



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



TRANSLATION TECHNIQUES AND QUALITY OF NOUN PHRASES ON THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT'S WEBSITE

THESIS

Proposed as a Compulsory Prerequisite
for Bachelor's Degree in Applied Linguistics (S.Tr.Li.)

NAOMI ANDREA ZEBUA
2108411019

**STUDY PROGRAM OF ENGLISH FOR BUSINESS AND
PROFESSIONAL COMMUNICATION**

**DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

DEPOK

2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



TRANSLATION TECHNIQUES AND QUALITY OF NOUN PHRASES ON THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT'S WEBSITE

THESIS

Proposed as a Compulsory Prerequisite
for Bachelor's Degree in Applied Linguistics (S.Tr.Li.)

NAOMI ANDREA ZEBUA
2108411019

**STUDY PROGRAM OF ENGLISH FOR BUSINESS AND
PROFESSIONAL COMMUNICATION**

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DEPOK

2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PRONOUNCEMENT

I, the undersigned:

Student Name : Naomi Andrea Zebua
Student ID : 2108411019
Study Program : English for Business and Professional Communication (BISPRO)
Thesis Title : Translation Techniques and Quality of Noun Phrases on the Indonesian Constitutional Court's Website

Hereby declare that this thesis is my original work and is free from plagiarism or any form of imitation of others' works. All quotations and references from other sources have been appropriately cited following the applicable guidelines for academic writing.

If then this pronouncement proves false, I am willing to accept any academic punishment.

Depok, 28 July 2025.

The declarant,

Naomi Andrea Zebua

NIM 2108411019



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEGITIMATION

The following thesis is proposed by:

Student Name : Naomi Andrea Zebua
Student ID : 2108411019
Study Program : English for Business and Professional Communication
(BISPRO)
Thesis Title : Translation Techniques and Quality of Noun Phrases on
the Indonesian Constitutional Court's Website

It has been examined by the Board of Thesis Examiners on Monday, 14 July 2025 and
Decided "PASSED"

Board of Thesis Examiners		Signature
Head of Examiner & Examiner 3	Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum.	
Examiner 1	Dr. Drs. Nur Hasyim, M.Si., M.Hum.	
Examiner 2	Taufik Eryadi Abdillah, S.S., M.Hum.	

Under the supervision of Board of Thesis Supervisors

Board of Thesis Supervisors		Signature
Supervisor 1	Dr. Drs. Supriatnoko, M. Hum.	
Supervisor 2	Dr. Tantri Sari Safitry, S.Pd., M.Pd.	

Legalized by:
Head of Department
Business Administration



Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si.
NIP. 198007112075041001

Depok, 28 July 2025

Acknowledged by
Coordinator of Study Program
English for Business and Professional Communication
(BISPRO)

Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

Praise be to God for His blessings and mercy, through which the researcher was able to complete this thesis titled “Translation Techniques and Quality of Noun Phrases on the Indonesian Constitutional Court’s Website” in a timely manner. This study has deepened the researcher’s understanding of linguistics, particularly the importance of accurate translation in public communication, especially within sensitive contexts. The journey to completing this thesis has been both challenging and rewarding. It has taught the researcher valuable lessons in perseverance and patience and reinforced her passion for language and its role in bridging communication gaps. The researcher is grateful for the opportunity to contribute to the field of applied linguistics and would like to express her sincere gratitude to the following individuals, whose support has been essential to the completion of this work:

- 1) Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum., Coordinator of the English for Business and Professional Communication Study Program, for her unwavering guidance and support throughout this journey;
- 2) Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum., for his dedication and commitment to helping the researcher refine her work. His willingness to review and revise the thesis drafts, even outside of working hours, and his keen attention to detail have greatly contributed to the depth and quality of this research;
- 3) Dr. Tantri Sari Safitry, S.Pd., M.Pd., whose thought-provoking questions and constructive feedback consistently challenged the researcher to strengthen her arguments and expand her perspective. Her insightful approach was instrumental in refining the ideas presented in this study;
- 4) Mr. Taufik Eryadi Abdillah, S.S., M.Hum., who served as one of the examiners during both the proposal seminar and the thesis defense. Additionally, his willingness to act as one of the raters for the data and provide meaningful input greatly contributed to the validity of this research;
- 5) Mr. Taufik Nur Hidayat, S.Pd., M.Hum., also an examiner during the proposal seminar and one of the raters, whose patience and kindness left a strong



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

impression. His ability to communicate thoughtfully and respectfully as both a lecturer and mentor helped create a meaningful academic dialogue;

- 6) Ms. Ratna Widya Iswara, S.Pd., M.Pd., another rater for this study, whose availability, warmth, and sharp critical eye made a lasting impact. Her detailed input was both inspiring and constructive;
- 7) Dr. Drs. Nur Hasyim, M.Si., M.Hum., who served as an examiner during the thesis defense. His appreciation of the research and his insightful comments on linguistic and writing aspects greatly enriched the researcher's understanding of the subject matter;
- 8) The researcher would also like to express her deepest appreciation to her family and friends for their continuous support, love, and encouragement. Their unwavering belief in the researcher, along with their thoughtful advice, has been a constant source of strength throughout this process;
- 9) Finally, the researcher wishes to express her deepest affection for Audrey von Louisiana, whose loyal companionship provided comfort and emotional support during the most exhausting moments of this process.

The researcher hopes this thesis will be of great benefit to many. She extends her deepest gratitude to all parties involved and apologizes for any deficiencies during the writing process and in the content of this thesis.

Thank you.

Depok, 28 July 2025
The Researcher,

Naomi Andrea Zebua.
2108411019



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CONSENT OF THESIS PUBLICATION FOR ACADEMIC INTERESTS

I, the undersigned:

Student Name : **Naomi Andrea Zebua**
Student ID : **2108411019**
Study Program : **English for Business and Professional Communication (BISPRO)**
Department : **Business Administration**
Manuscript : **Thesis (*Skripsi*)**

In the pursuit of knowledge advancement, I hereby consent to entrust and grant to Politeknik Negeri Jakarta Non-exclusive Royalty-free Right for my thesis entitled:

TRANSLATION TECHNIQUES AND QUALITY OF NOUN PHRASES ON THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT'S WEBSITE

along with any related materials (if necessary). With this Non-exclusive Royalty-free Right, **Politeknik Negeri Jakarta** reserves the right to store, transfer, disseminate, manage in the form of a database, maintain, and publish my thesis while continuing to acknowledge my name as the author/creator and copyright holder.

In witness whereof, I hereby make this statement truthfully.

Made in : Depok,
On the date of : 28 July 2025
Declared by :

Naomi Andrea Zebua

Manuscript: thesis, non-seminar papers, practical work reports, internship reports, professional and specialized tasks.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TRANSLATION TECHNIQUES AND QUALITY OF NOUN PHRASES ON THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT'S WEBSITE

Naomi Andrea Zebua

2108411019

English for Business and Professional Communication

Thesis Advisors: Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.; Dr. Tantri Sari Safitry, S.Pd, M.Pd.

ABSTRACT

A reliable legal system is essential for the stability of any democratic country. The Indonesian Constitutional Court holds a crucial role in upholding constitutional order and protecting citizens' rights. To support transparency and maintain public trust, the Court publishes official news texts on its bilingual website in both Bahasa Indonesia and English. Many key terms in these texts appear as noun phrases, which often carry specific political and institutional information. This research focuses on how noun phrases are translated from Bahasa Indonesia into English in news texts on the Court's website. It aims to identify the types of noun phrases, the translation techniques applied, and the accuracy of the translations. This study uses a qualitative descriptive method of analysis. A total of 139 noun phrases are included as research data, as each has a corresponding translation. Based on Widjono's (2005) classification, 122 noun phrases (87.77%) are modificative, 11 (7.91%) are coordinative, and 6 (4.32%) are appositive. From Molina and Albir's (2002) framework, nine out of eighteen translation techniques are identified. The most frequently used are calque (42 instances), established equivalence (40 instances), and reduction (24 instances). Accuracy was assessed using Nababan et al.'s (2012) framework through Focus Group Discussions (FGD) with three raters with relevant background and competences. Calque produced mostly accurate results (83.33%), while established equivalence consistently resulted in accurate translations. In contrast, reduction led to much lower accuracy, with only 3 out of 24 translations (12.5%) rated accurate. The final accuracy score is not based on frequency, but on the average of the three rater scores for each noun phrase. The overall mean score is 2.50, placing the translations in the "less accurate" category. The findings highlight the varying effectiveness of different techniques across noun phrase types and emphasize the importance of selecting appropriate techniques, particularly when translating politically sensitive texts where precision is crucial.

Keywords: *Indonesian Constitutional Court, Noun Phrase Types, Translation Accuracy, Translation Techniques, Translation Quality*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAK

Sistem hukum yang andal merupakan fondasi penting bagi stabilitas negara demokratis mana pun. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memegang peran krusial dalam menegakkan tatanan konstitusional dan melindungi hak-hak warga negara. Dalam rangka mendukung transparansi untuk menjaga kepercayaan publik, Mahkamah secara rutin menerbitkan berita resmi melalui situs web dwibahasa dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Banyak istilah penting dalam teks-teks ini berbentuk frasa nomina yang memuat informasi politis dan institusional. Penelitian ini berfokus pada bagaimana frasa nomina diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris pada teks berita di situs web Mahkamah. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis frasa nomina, teknik penerjemahan yang digunakan, serta tingkat keakuratannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari seluruh frasa nomina yang ditemukan, hanya 139 yang memenuhi kriteria sebagai data karena masing-masing memiliki padanan terjemahan dalam Bahasa Inggris; sisanya tidak dianalisis karena tidak memiliki terjemahan. Berdasarkan klasifikasi Widjono (2005), sebanyak 122 frasa nomina (87,77%) tergolong tipe modifikatif, 11 (7,91%) koordinatif, dan 6 (4,32%) apositif. Berdasarkan teori Molina dan Albir (2002), ditemukan sembilan dari delapan belas teknik penerjemahan. Tiga teknik yang paling banyak digunakan adalah calque (42 data), padanan lazim (40), dan reduksi (24). Tingkat keakuratan diterjemahkan menggunakan kerangka Nababan et al. (2012) melalui diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion / FGD) bersama tiga orang raters dengan kualifikasi dan kompetensi di bidang bahasa. Tingkat akurasi teknik calque bervariasi tetapi sebagian besar akurat (83,33%), sedangkan padanan lazim secara konsisten menghasilkan terjemahan yang akurat. Sebaliknya, teknik reduksi menunjukkan tingkat akurasi yang jauh lebih rendah, dengan hanya 3 dari 24 terjemahan (12,5%) yang dinilai akurat. Skor akhir keakuratan tidak dihitung berdasarkan frekuensi, melainkan dari rata-rata nilai yang diberikan oleh ketiga raters terhadap masing-masing frasa nomina. Nilai rata-rata keseluruhan adalah 2,50, yang menggolongkan kualitas terjemahan dalam kategori “kurang akurat”. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas setiap teknik bervariasi pada setiap tipe frasa nomina serta menekankan pentingnya pemilihan teknik yang tepat, terutama dalam menerjemahkan teks-teks yang bersifat sensitif secara politik, di mana ketepatan makna sangatlah penting.

Kata Kunci: Akurasi Terjemahan, Kualitas Terjemahan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tipe-tipe Frasa Nomina, Teknik Penerjemahan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

COVER	i
PRONOUNCEMENT	ii
LEGITIMATION.....	iii
PREFACE	iv
CONSENT OF THESIS PUBLICATION FOR ACADEMIC INTERESTS. vi	
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
TABLE OF CONTENTS.....	ix
LIST OF TABLES	xii
LIST OF FIGURES	xiii
LIST OF ABBREVIATIONS.....	xiv
CHAPTER I: INTRODUCTION	1
1.1 Background of the Study	1
1.2 Statement of the Problems	3
1.3 Objectives of the Study.....	3
1.4 Limitations of the Study	4
1.5 Significances of the Study	5
CHAPTER II: LITERATURE REVIEW.....	6
2. 1 News Text	6
2.1.1 Definition of News Text	6
2.1.2 Characteristics of News Text.....	6
2.1.3 Types of News Text	7
2.2 The Indonesian Constitutional Court's Website	9
2.3 Phrase.....	9



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3.1 Definition of Phrase.....	9
2.3.2 Definition of Noun	10
2.3.3 Definition of Noun Phrases	10
2.3.4 Types of Noun Phrases.....	11
2.3.5 Structure and Formation of Noun Phrases	12
2.4 Translation	12
2.4.1 Definition of Translation	12
2.4.2 Translation Techniques.....	13
2.4.3 Translation Quality Assessment.....	18
2.4.4 Accuracy in Translation Quality.....	19
2.5 Reviews of Relevant Studies.....	20
2.6 Research Framework	35
CHAPTER III: RESEARCH METHOD.....	36
3.1 Research Design.....	36
3.2 Data and Source of Data	37
3.2.1 Data	37
3.2.2 Sources of Data	38
3.3 Sampling Technique.....	38
3.4 Data Collection Technique.....	39
3.4.1 Content Analysis.....	40
3.4.2 Focus Group Discussion (FGD)	41
3.5 Data Validity.....	42
3.5.1 Triangulation of Data Sources.....	42
3.5.2 Triangulation of Methods.....	43
3.6 Data Analysis Technique.....	44
3.6.1 Domain Analysis	45
3.6.2 Taxonomy Analysis.....	47
3.6.3 Componential Analysis.....	47
3.6.4 Cultural Theme Analysis	48
CHAPTER IV: RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION	50



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1 Research Results	50
4.1.1 Classification of Noun Phrase Types.....	50
4.1.2 Translation Techniques.....	58
4.1.3 Quality of Translation Accuracy.....	75
4.2 Discussion.....	81
CHAPTER V: CONCLUSION AND SUGGESTIONS.....	88
5.1 Conclusion	88
5.2 Suggestions	89
BIBLIOGRAPHY	91
CURRICULUM VITAE.....	96
APPENDICES	98

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

<i>Table 2.1 Breakdowns of Translation Quality</i>	<i>19</i>
<i>Table 3.1 Example of Domain Analysis</i>	<i>46</i>
<i>Table 3.2 Example of Taxonomy Analysis</i>	<i>47</i>
<i>Table 3.3 Example of Componential Analysis</i>	<i>48</i>
<i>Table 4.1 Table of Classification of Noun Phrase</i>	<i>50</i>
<i>Table 4.2 Translation Techniques</i>	<i>58</i>
<i>Table 4.3 Translation Accuracy</i>	<i>75</i>
<i>Table 4.4 Tabulation</i>	<i>81</i>

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

LIST OF FIGURES

<i>Figure 2.1 Framework</i>	35
<i>Figure 3.1 Spradley's Analysis Scheme</i>	44



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF ABBREVIATIONS

Abbreviation	Full Term
APP-n	: Appositive Noun Phrase (e.g., APP-1 to APP-6)
Court	: The Constitutional Court (used to refer to <i>MKRI</i> *)
CRD-n	: Coordinative Noun Phrase (e.g., CRD-1 to CRD-11)
<i>MK</i>	: <i>Mahkamah Konstitusi</i> (Constitutional Court)
<i>MKRI</i> *	: <i>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i> (Indonesian Constitutional Court)
MOD-n	: Modificative Noun Phrase (e.g., MOD-1 to MOD-122)
NP	: Noun Phrase
SL	: Source Language
ST	: Source Text
TL	: Target Language
TT	: Target Text

* *in alphabetical order*

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Background of the Study

A well-functioning legal system that upholds justice and fairness is fundamental to the stability and sustainability of a democratic nation. In Indonesia, one of the key institutions responsible for maintaining this principle is the Indonesian Constitutional Court (*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, MKRI). The Court plays a central role in maintaining legal order, protecting citizens' rights, and ensuring the government adheres to the Constitution (Isra & Faiz, 2024). Over the years, it has exercised significant influence, at times extending beyond its constitutional mandate (Armia, 2023).

As stipulated in Article 24C of the 1945 Constitution and further elaborated in Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court, the Court is authorized to review laws, resolve disputes between state institutions, rule on the dissolution of political parties, and adjudicate disputes arising from election results. Additionally, it holds the constitutional authority to decide on motions from the House of Representatives (*Dewan Perwakilan Rakyat*, DPR) seeking to impeach the President or Vice President for legal or ethical violations, or for failing to fulfill constitutional obligations. Through these duties, the Court plays a critical role in maintaining constitutional order, ensuring that the country's laws and political processes remain within their legal bounds.

Given the significance of the Court's authorities and influences, its activities inevitably draw attention from both domestic and international audiences. The dissemination of accurate and timely information about its decisions, hearings, and public engagements becomes essential. To fulfill this need, the Court provides official updates through its website, available in both Bahasa Indonesia (<https://www.mkri.id/>) and English (<https://en.mkri.id/>). By offering bilingual access to its news and information, the Court not only enhances public transparency and trust but also helps mitigate misinformation.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

In the Court's news texts, many terms that deliver specific and detailed information are expressed as noun phrases, including names, titles, and institutional terms. These include individuals such as *Wakil Ketua MK Saldi Isra* (Deputy Chief Constitutional Justice Saldi Isra), institutions such as *Komisi Pemilihan Umum* (General Election Commission), and parts of ruling pronouncements. While all types of phrases are important in translation, this research focuses solely on noun phrases because, in a political news context, they often encapsulate crucial entities and concepts that require careful handling to preserve their full meaning. For example, consider the institutional noun phrase "*Kejaksaan Republik Indonesia*". In the translated version, it appears as "Attorney General's Office." While this rendering conveys the general institutional role, it omits the country reference "*Republik Indonesia*," thereby reducing the specificity of the original term. This subtle loss may affect readers' understanding, especially in international or comparative contexts where identifying the national affiliation of legal or governmental bodies is critical. Such cases highlight how the accurate translation of noun phrases can influence the perceived authority, jurisdiction, and identity of political and legal institutions.

Based on Widjono's (2005) classification, noun phrases are initially categorized into modificative, coordinative, and appositive types. Since noun phrases are micro-level linguistic units, the translation techniques are applied, using the theory formulated by Molina and Albir's (2002) to identify the techniques applied by the Court's translators. Translation quality is then assessed solely by accuracy, following Nababan et al.'s (2012) parameters, because accuracy ensures the target audience correctly understands the political content without misinterpretation. Given the importance of maintaining meaning and clarity in its sensitive political context, this research aims to provide an understanding of how well the Court's news content is translated from Bahasa Indonesia into English by providing an analysis of the types of noun phrases, the translation techniques employed, and the translation accuracy of each noun phrases.

Several previous studies are relevant to this research, one of which is Nuralasari (2023), who examined the translation of noun phrases in news texts on



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

the Cabinet Secretariat's official website (setkab.go.id), focusing on translation techniques and readability. While her findings highlighted the role of established equivalent and reduction techniques in producing readable translations, this present reserach takes a different approach by prioritizing accuracy over readability. Specifically, it investigates the translation techniques employed and their potential impact on the accuracy level of noun phrases on the Indonesian Constitutional Court's website. Another relevant study is Nurjanah (2020), who explored the translation techniques and quality of noun phrases on the BBC website. Her research focused on how translation techniques influenced the overall quality of noun phrase translations, using the same theoretical frameworks applied in this study. While both studies examine noun phrase types and evaluate translation quality, the present research fills a gap by shifting the focus to noun phrases in political context. By analyzing translations on the Indonesian Constitutional Court's website, this research highlights the importance of accuracy in formal government communication and examines how different techniques affect the precision of meaning in a political context.

1.2 Statement of the Problems

Based on the background of the study stated above, the problem can be formulated as follows:

1. What are the types of noun phrases in the source news text on the Indonesian Constitutional Court's website based on Widjono's (2005) classification?
2. What are Molina and Albir's (2002) translation techniques applied in translating noun phrases from source text (Bahasa Indonesia) to target text (English)?
3. How accurate is the translation of noun phrases from the source text to the target text, based on Nababan et al.'s (2012) accuracy parameter?

1.3 Objectives of the Study

Based on the statement of the problem stated above, the objectives of the study are as follows:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. To identify the types of noun phrases in the source news text on the Indonesian Constitutional Court's website based on Widjono's (2005) classification.
2. To identify Molina and Albir's (2002) translation techniques applied in translating noun phrases from source text (Bahasa Indonesia) to target text (English).
3. To assess the accuracy of noun phrase translations from the source text to the target text using the accuracy parameter by Nababan et al. (2012)

1.4 Limitations of the Study

To maintain focus and analytical clarity, this study is limited in scope as follows:

1. The linguistic scope is restricted to the analysis of noun phrases in Bahasa Indonesia (Source Language, SL) and their translations in English (Target Language, TL) found specifically within news texts published on the Indonesian Constitutional Court's official website.
2. The data is drawn from the selected recent and general-topic news text published on the Constitutional Court's website as of March 2025, selected for its relevance and representativeness of the Court's current translation practices.
3. Although the data was initially drawn from ten recent and general news texts published on the Constitutional Court's website to observe translation consistency, only one news text was selected for final analysis due to its higher density of noun phrases. This allowed for more comprehensive evaluation. The selected text contains 139 identifiable noun phrases with direct English translations. Only translated noun phrases were considered as data.
4. This research identifies the types of noun phrases in the source news text on the Constitutional Court's website, using the classification framework formulated by Widjono (2005).
5. The analysis of translation techniques in this research is based on the framework formulated by Molina and Albir (2002).
6. The focus of translation quality assessment is accuracy, evaluated using the parameters formulated by Nababan et al. (2012).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.5 Significances of the Study

This study offers contributions in several fields, including:

1. Theoretical Significance

This research contributes to the understanding of types of noun phrases (Widjono, 2005), translation techniques (Molina & Albir, 2002), and accuracy assessment (Nababan et al., 2012) in translating noun phrases from source text to target text on the Indonesian Constitutional Court's website. The findings support the study of grammar and translation, particularly for students, translators, and language professionals dealing with political and/or journalistic texts.

2. Practical Significance

The research offers practical insights into how noun phrases are translated in political news content on a government website. It serves as a reference for translators and institutions needing accurate and contextually appropriate translations. The results can guide the translation of other official government texts, emphasizing precision and clarity in public communication.

3. Future Research

The methodology and findings can be used as a reference for future research on noun phrase translation in other government websites or official documents. It supports further exploration into translation quality assessment and techniques in various formal and institutional contexts.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER V

CONCLUSION AND SUGGESTIONS

5.1 Conclusion

This research examined one hundred thirty-nine (139) noun phrases and successfully classified them according to Widjono's (2005) typology. The modificative type is the most prevalent, accounting for one hundred twenty-two (122) instances, demonstrating its dominance in formal institutional language. The coordinative type appears far less frequently, with only eleven (11) instances identified. The appositive type is the least common, with just six (6) occurrences in the dataset. These findings suggest that Indonesian legal and governmental texts rely heavily on modification structures to express precision and hierarchical information.

Out of the eighteen (18) translation techniques proposed by Molina and Albir (2002), nine (9) techniques are found to be used in translating the noun phrases. The most frequent is calque, occurring forty-two (42) times, followed closely by established equivalence, with forty (40) instances. Other techniques include reduction (twenty-four [24]), generalization (nine [9]), transposition (eight [8]), and literal translation (seven [7]). Less common techniques such as modulation (six [6]), amplification (two [2]), and borrowing (one [1]) were also present in the data. This variety reflects a broad range of translation strategies used when adapting structurally complex noun phrases from Indonesian to English.

According to the accuracy scale by Nababan et al. (2012), the overall translation quality of the noun phrases is rated less accurate, with a mean score of approximately two point five (2.50). Among the techniques used, established equivalence produced the highest accuracy, with all forty (40) of its uses judged accurate. In contrast, reduction frequently resulted in quality loss, with only three (3) accurate out of twenty-four (24) instances, and the rest either less accurate or inaccurate. Accuracy levels also vary depending on noun phrase type, where the modificative type shows the widest technique distribution and the largest variation in translation quality.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

When considering all noun phrase types collectively, calque and established equivalence emerge as the most frequently used and most effective techniques. While calque shows mostly accurate outcomes, thirty-one (31) out of forty-two (42), its performance varies by context. Established equivalence, however, stands out with consistent accuracy across all forty (40) instances. In contrast, reduction and generalization demonstrate a pattern of low accuracy. Of nine (9) generalization instances, only three (3) were accurate, suggesting that oversimplifying terms can negatively affect clarity and precision in political or legal translation.

These results confirm that certain techniques are better suited to institutional and political texts than others. Techniques like established equivalence and calque tend to preserve both structural integrity and semantic content effectively. On the other hand, techniques such as reduction and generalization may compromise the exactness required in high-stakes translation, especially where meaning loss can lead to misinterpretation or diminish legal validity. The consequences of inaccurate noun phrase translations in such contexts could affect public perception, policy understanding, or institutional credibility.

Conclusively, this research highlights the critical role of technique selection in achieving accurate noun phrase translations in institutional contexts. While some techniques offer clarity and precision, others require caution due to their tendency to omit or generalize key information. The findings reinforce that accuracy should be prioritized over surface-level fluency in legal or political texts, where even minor mistranslations can carry significant implications. Moving forward, translators working in official or governmental domains must weigh each technique's risks and benefits to ensure translations meet both semantic and structural expectations.

5.2 Suggestions

The findings of this study indicate that there are still several instances where meaning shifts, omissions, or structural inconsistencies occur in noun phrase translations on the Constitutional Court's website. These issues are particularly important in political context translation, where clarity, precision, and consistency



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

are essential. To address these findings, the following suggestions are offered by the researcher, which are:

1. It would be beneficial for the Court's translators to refer to a standardized list of legal terminology. Consistent use of equivalent terms can help avoid ambiguity and maintain the integrity of the legal message.
2. Translators might consider being more selective in applying translation techniques, particularly avoiding excessive simplification that could lead to loss of legal nuance.
3. An editorial review process may be helpful in ensuring that translations maintain both fidelity to the source and fluency in the target language. This could also support ongoing quality improvement.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BIBLIOGRAPHY

- Adebileje, A. (2016). *Forms and functions of the English noun phrase in selected Nigerian texts. IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 21(2), 45–49.
- Aderinanda, B. (2020). Analisis Teknik dan Kualitas Terjemahan dengan Google Translate pada Frasa Nomina dalam Buku Foundations of Python Network Programming 3. *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- Agil Aria Alif Putra. (2024). The Analysis of Translation Technique and Quality of the Public Information at PT Garuda Indonesia Tbk. *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- Agnes Suryaningsih Kaban. (2020). Analisis Terjemahan Frasa Nomina dalam Artikel Situs Quora oleh Hikmat Gumila. *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- Alwi, H., Dardjowidjojo, S., Lapoliwa, H., & Moeliono, A. M. (2003). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia (3rd ed.)*. Balai Pustaka.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Revised ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulia Nurani Fitrohati. (2024). Analysis of Quality of Conceptual Metaphor of Automatic Translation Feature on Political News Headlines of Tempo.co (@tempodotco) and Kompas TV (@KompasTV) on X. *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- Baker, M. (2018). *In Other Words: A Coursebook on Translation* (2nd ed.). London: Routledge.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* [Great Dictionary of the Indonesian Language].
- Catford, J. C. (1965). *A linguistic theory of translation: An essay in applied linguistics*. Oxford University Press.
- Cahyani, U. N. (2023). Analysis of Translation Quality on Loss and Gain Information in Government News on the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Chaer, A. (2009). *Linguistik Umum* (2nd ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Djuraid, A. (2012). *Jurnalistik: Pengantar Teori dan Praktik* (6th ed.). Jakarta: Gramedia.
- Ersa Muti Ruwaida. (2024). Analysis of Translation Techniques and Acceptability of Metaphor Terms in Headline News Presidential Election 2024 at Kompas.com. *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- Faira Respati Parmusinto. (2024). Translation Techniques, Accuracy, and Readability of Adverbs of Manner in the Opening and Closing Remarks of International Meetings of the Directorate General of the Defense Potential of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia. *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- Grbich, C. (2007). *Qualitative Data Analysis: An Introduction* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Hariyono, S. (2002). *Panduan lengkap tata bahasa Indonesia*. Pustaka Widyatama.
- Hartman, R. R. K., & Stork, F. C. (1972). *Dictionary of Language and Linguistics*. London: Applied Science Publishers.
- Heidy Desry Noviany. (2024). Comparative Error Analysis between Google Translate and DeepL in Translation Quality of ‘Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021’. *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- Hidayat, B. (2023). Technique and Accuracy Analysis of Texts Translation in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges. *D4 Thesis*. Politeknik Negeri Jakarta, Depok.
- Isra, S., & Faiz, P. M. (2024). The Indonesian Constitutional Court. In *Courts and diversity: Twenty years of the Constitutional Court of Indonesia* (Chapter 3). Indonesian Constitutional Court.
- Kusumaningrat, M. (2012). *Dasar-Dasar Jurnalistik* (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Larson, M. L. (1984). *Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence*. University Press of America.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Machali, R. (2003). *Pedoman Menerjemahkan*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia.
- Marsya Yasmin Aulidinniya. (2024). Translation Techniques and Accuracy Quality of Declarative Sentences on Garuda Indonesia and Batik Air Web Check-In. *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Molina, L., & Albir, A. H. (2002). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta: Translators' Journal*, 47(4), 498–512. <https://doi.org/10.7202/008033ar>
- Muhammad Usamah. (2024). Analysis of Translation Techniques and Quality Assessment of Promotional Phrases in the Official Website of MSI.com. *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- Murtiningsih, D. R. (2020). An Analysis of Translation Method Found in the Translation Work by Class of 2016 at English Department UIR. *D4 Thesis*. Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Nababan, M. R., Nuraeni, A., & Sumardiono. (2012). *Pengembangan model penilaian kualitas terjemahan* [Development of a translation quality assessment model]. *Kajian Linguistik dan Sastra*, 24(1), 39–57.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Harlow: Prentice Hall.
- Nurjanah, R. (2020). Analisis Teknik dan Kualitas Terjemahan Frasa Nomina pada Teks Berita Bidang Sains dan Lingkungan di Situs Web British Broadcasting Corporation (BBC). *D4 Thesis*. Politeknik Negeri Jakarta, Depok.
- Nurmalasari, A. (2023). An Analysis of Translation Techniques and Readability of Noun Phrase in the Cabinet Secretariat Website News Text. *Skripsi* . Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- Oxford University Press. (2023). *Oxford English Dictionary*.
- Oxford English Dictionary. (2023). *News. in the Oxford English Dictionary online*. Retrieved from <https://www.oed.com/>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Patton, M. Q. (as cited in Santosa, 2017). *Qualitative Research and Evaluation Methods (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pym, A. (2013). *The Translator's Turn*. London: Routledge.
- Pahrul Hadi, M. Z., & Suhendra, E. (2020). *The use of translation ideology and techniques in the Indonesian version of Agatha Christie's Endless Night novel*. *Humanitatis: Journal of Language and Literature*, 6(2), 231–250. <https://doi.org/10.30812/humanitatis.v6i2.791>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* [The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia].
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* [Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court].
- Romli, I. (2014). *Jenis-Jenis Berita dalam Jurnalistik* (1st ed.). Jakarta: Pustaka Media.
- Santosa, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*. Jakarta: Kencana.
- Sarah Aulia. (2024). Analysis of Translation Technique and Quality of Noun Phrases in the Children's Storybook "Antologi Cerita Anak ASEAN". *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- Soang, L.-L. (2016). *Translation teaching: The importance of the translator's native language*. *Open Journal of Modern Linguistics*, 6(4), 247–254. <https://doi.org/10.4236/ojml.2016.64027>
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (14th Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sumadiria, S. (2005). *Jurnalistik: Pengantar Teori dan Praktik* (5th Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Tahlitha Laela Dzikrin. (2024). Translation Quality of Connotative Meaning in Indonesia 2024 Election News Published by Official Website of MKRI.id. *D4 Thesis*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta. A



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Widjono. (2005). *Bahasa Indonesia: Mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Widjono HS, A. (2007). *Sintaksis Bahasa Indonesia* (2nd Ed.). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Yandryati, S., & Purwadi, H. (2017). *Dasar-Dasar Jurnalistik* (1st Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CURRICULUM VITAE

Naomi Andrea Zebua

<https://www.linkedin.com/in/naomi-andrea-z-6458a5223/>



Naomi Andrea Zebua values clear, respectful, and solution-focused communication. Her preferred approach is practical, meaning she prioritizes realistic solutions and prefers to take decisive, effective action. However, she deeply values human connection and is drawn to diplomatic leadership and collaborative problem-solving. Diverse ideas and angles from wide range of sources excite her, including from the people she meets and the media she consumes. Known for her curiosity, Naomi loves to explore, step beyond her comfort zone, and embrace challenges, even those that require necessary risks. She enjoys working both independently and as part of a team. Helping others brings her a sense of fulfillment. She takes pride when her contributions lead to meaningful outcomes. She also finds genuine excitement to observe closely and learning from those around her. In professional settings, she consciously avoids passive-aggressive behavior and prefers respectful, straightforward, face-to-face feedback. She handles criticism moderately well, seeing it as a tool for growth. Above all, Naomi deeply values honesty.

During her academic years at Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Naomi actively balanced academic excellence with student involvement. In her first year, she won first place in a public speaking competition held by her study program. She later became one of the top-performing students in the Department of Business Administration by achieving one of the highest GPAs, while also serving as President of the Polytechnic English Club (PEC), one of PNJ's student organizations. As PEC President, Naomi and her team played a significant role in reactivating on-site activities, successfully reintegrating face-to-face engagement and revitalizing participation post-COVID-19. One of the most notable initiatives during her term was organizing a structured mentorship program to prepare delegates for a national-level English competition. The program began with a campus-wide selection, followed by collaboration with lecturers



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

who served as mentors. Funding was secured through both internal efforts and formal proposals to PNJ. This initiative, involving multiple stakeholders across the campus, led to several competition medals and enhanced the university's visibility. More importantly, it strengthened collaboration and fostered lasting, meaningful experiences for everyone involved.

So far, her professional experience spans both governmental and private institutions. At the Indonesian Constitutional Court, she interned under the Public Relations and Protocol Bureau, where she contributed to a variety of project, including international partnership proposals, one of which received moderately positive and enthusiastic internal feedback. Her other responsibilities including content creation, editing, translation, basic video editing, voice-over work, capturing footage from official hearings, managing data-related tasks and coordinating sensitive information between the Court and institutions such as the Ministry of Foreign Affairs. In supporting official hearings and protocol arrangements, she ensured smooth execution and provided necessary support across events. Beyond adapting to high standards and tight deadlines, she valued the opportunity to collaborate with professionals across departments and broaden her professional insights.

Furthermore, she interned at O2 Consulting, a public affairs and communications firm, as an analyst intern. She was also entrusted to be part of variety of project from various valuable and diverse clients, including media monitoring, contributed to research-based projects, assisted with event planning and execution, created proposals and visual materials, etc. She adapted moderately well to the fast-paced environment, expanded her professional network, and consistently took initiative to learn while supporting her team.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

APPENDICES

A. Source News Text



Jumat, 21 Maret 2025 | 05:15 Dilihat : 3144

Pemohon Uji Kejaksaan Tidak Miliki Kedudukan Hukum

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) memutus Perkara Nomor 178/PUU-XXII/2024 mengenai permohonan pengujian materi Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menunjukkan anggapan kerugian hak konstitusional atas ketentuan yang diuji tersebut sehingga dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

"Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Jumat (21/3/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan para Pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan setidaknya lima syarat yang telah ditentukan terkait ada atau tidaknya hak konstitusional yang dirugikan. Para Pemohon harus menyampaikan uraian adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional serta anggapan kerugian hak konstitusional yang diderita atau dialami dengan berlakunya norma undang-undang yang diuji.

Mahkamah menilai uraian berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021. Dalam permohonannya, para Pemohon mengaku mengalami kerugian hak konstitusional karena norma yang diajukan pengujian tersebut mensyaratkan untuk menjadi seorang jaksa adalah memiliki ijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan.

Namun, walaupun para Pemohon dinyatakan tidak lolos seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Kejaksaan Agung, para Pemohon tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum kaitannya dengan perihal isu konstitusional berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan karena pada saat melakukan pendaftaran seleksi CASN pada Kejaksaan Agung, para Pemohon telah berijazah sarjana hukum, dari segala jenis program studinya, dapat turut serta dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung in casu sebagai calon Jaksa.

<https://www.mkri.id/berita/pemohon-uji-kejaksaan-tidak-miliki-kedudukan-hukum-23076>

1/5



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7/22/25, 4:32 PM

Pemohon Uji Kejaksaan Tidak Miliki Kedudukan Hukum - Berita | Mahkamah Konstitusi RI

"Sehingga berkenaan persyaratan berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan, sudah tidak lagi terdapat keterkaitan logis dan causal verband bahwa ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon," jelas Arsul.

Sedangkan, ihwal tidak lolosnya para Pemohon pada tahap seleksi administrasi CASN Kejaksaan Agung karena tidak sesuai kualifikasi program studi yang dipersyaratkan adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung sebagai instansi yang berwenang dalam menentukan kualifikasi dan kompetensi terkait kebutuhan CASN pada organisasinya. Dalam konteks ini, kerugian yang diuraikan pada permohonan tidak cukup meyakinkan sebagai kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak cukup terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang diuji.

Terlebih instansi yang membutuhkan CASN dapat menentukan secara spesifik kualifikasi program studi yang dibutuhkan. Misalnya, sangat mungkin suatu instansi membutuhkan sarjana hukum tanpa perlu menentukan program studi secara spesifik atau dapat juga menentukan sarjana hukum dengan spesifikasi atau kualifikasi tertentu.

"Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo," kata Arsul.

Sebagai informasi, para Pemohon perkara ini ialah dua sarjana hukum program studi (prodi) hukum tata negara yakni Silvi Nudia Nazla dan Mohammad Fajar Ismail. Menurut para Pemohon, frasa 'sarjana hukum' dalam ketentuan persyaratan menjadi seorang jaksa dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 memuat cakupan yang terbatas sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi lulusan program studi yang serumpun di bidang hukum lainnya seperti program studi Hukum Islam, Hukum Tata Negara, atau Hukum Pidana Islam.

"Di Undang-Undang Advokat itu untuk mengakomodir adanya lulusan Fakultas Syariah itu frasanya itu bukan sarjana hukum lagi, tetapi sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum sehingga kami bisa menjadi advokat di situ," ujar kuasa hukum Para Pemohon A. Fahrur Rozi dalam sidang perbaikan permohonan pada Kamis (6/3/2025) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Namun, jika mengacu pada UU Kejaksaan yang mencantumkan frasa 'sarjana hukum', kesempatan untuk menjadi seorang jaksa hanya terbuka bagi sarjana hukum sedangkan sarjana hukum bidang Islam tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang jaksa. Fahrur mengatakan, dalam konteks pemberlakuan norma frasa 'sarjana hukum' tersebut menimbulkan eksklusivitas terhadap suatu kualifikasi pengetahuan yang sejatinya sama justru diberlakukan suatu ketentuan yang diskualifikatif kepada salah satunya.

Mekanisme rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) pada formasi jaksa yang eksklusif dimaksud dialami para Pemohon yang dinyatakan tidak lolos syarat administratif karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dengan program studi yang disyaratkan. Kejaksaan Republik Indonesia merumuskan syarat kelulusan pada formasi jaksa hanya mencakup dan diperuntukkan bagi dua nomenklatur lulusa program studi yaitu S-1 Program Studi Hukum atau S-1 Program Studi Ilmu Hukum.

Padahal, kata kuasa hukum para Pemohon lainnya Zulfikar Putra Utama mengatakan Republik Rakyat China telah menetapkan ketentuan yang progresif dan inklusif dalam sistem rekrutmen kerja sebagaimana tercermin dalam kebijakan yang memungkinkan berbagai jalur kualifikasi untuk mencapai posisi jaksa. Sistem mereka tidak hanya terbatas pada lulusan sarjana hukum melainkan juga memberikan kesempatan kepada individu dengan latar belakang pendidikan non-hukum untuk

<https://www.mkri.id/berita/pemohon-uji-kejaksaan-tidak-miliki-kedudukan-hukum-23076>

2/5



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7/2/25, 4:32 PM

Pemohon Uji Kejaksaan Tidak Miliki Kedudukan Hukum - Berita Mahkamah Konstitusi RI

berkarir sebagai jaksa sepanjang memiliki kompetensi dan pemahaman yang mendalam di bidang hukum.

Sementara ketentuan di Spanyol tentang kualifikasi jaksa telah ditetapkan serangkaian persyaratan kompetensi yang bersifat substantif dan komprehensif. Ketentuan dimaksud secara eksplisit menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek fundamental sistem hukum yang meliputi kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan unsur-unsur, struktur, sumber daya, serta penerapan sistem hukum dari berbagai yurisdiksi termasuk di dalamnya kemampuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hukum, kedudukan hukum individu dalam konteks administratif dan hubungannya dengan badan-badan publik, serta kemampuan untuk menerapkan kriteria prioritas sumber hukum dalam menentukan norma yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai konstitusional yang mana seluruh persyaratan kompetensi tersebut ditetapkan tanpa membatasi secara rigid latar belakang program studi calon jaksa.

Dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa 'sarjana hukum' pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum," sehingga bunyi pasal selengkapny adalah "berijazah paling rendah sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum pada saat masuk Kejaksaan."

Baca juga:

**Gagal Lolos CPNS Jaksa, Dua Sarjana Hukum Tata Negara Gugat UU Kejaksaan
Menyoal Eksklusivitas Sarjana Hukum dalam Seleksi Jaksa**

Sebagai informasi, para Pemohon adalah dua sarjana hukum program studi hukum tata negara yakni Silvi Nudia Nazla dan Mohammad Fajar Ismail. Mereka mengaku hak konstitusionalnya dirugikan akibat pasal a quo yang mensyaratkan untuk menjadi seorang jaksa adalah memiliki ijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan. Para Pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi jaksa. Keduanya dinyatakan tidak lolos syarat administratif Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Agung untuk formasi Jaksa Ahli Pertama. Sebab, Silvia dan Fajar berstatus sarjana hukum bidang Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis: Mimi Kartika

Editor: Lulu Anjarsari P.

Humas: Raisa Ayuditha M.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

B. Translated News Text

1/23/25 - 4:00PM

NIKEDID/15/04/2025/Review No Legal Standing, Attorney General's Office Review Inadmissible

Petitioners Having No Legal Standing, Attorney General's Office Review Inadmissible



Justice Arsul Sani reading out the Court's legal considerations of the Decision on the Attorney General's Office Law review. Photo by MKRI/Parli.

Jakarta (MKRI) – The Constitutional Court declared Case No. 178/PUU-XXI/2024 on the material judicial review petition of Article 9 paragraph (1) letter d of Law No. 11 of 2021 on Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (Attorney General's Office Law) inadmissible. According to the Court, the Petitioners could not present the constitutional losses due to the enactment of the provisions being challenged so they were considered to have no legal standing.

"Declare the petitioners' petition inadmissible," Chief Justice Suharyoto pronounced the decision on Friday, March 21, 2025, at the Plenary Courtroom.

In reading out the legal considerations, Justice Arsul Sani stated that Petitioners of judicial review have the obligation to explain at least five requirements regarding constitutional losses they suffer. The Petitioners must deliver their arguments on constitutional rights and authorities and the presumption of constitutional losses they suffer or experience due to the enactment of the norms being challenged.

The Court considered the arguments related to the perceived constitutional harm experienced by the Petitioners as not having causal relations with the implementation of norms in Article 9 paragraph (1) letter d of Law No. 11 of 2021. In their petition, the Petitioners admitted that their constitutional rights had been harmed because the norms being tested required that to become a prosecutor, one must have a minimum certificate of bachelor's degree when they join the prosecutor's office.

However, despite being declared unqualified during the Civil Servant Candidates Selection in the Attorney General's Office, the Petitioners do not automatically have legal standing related to the constitutionality issue of the educational requirement to become a prosecutor. This is because the Petitioners could participate in the selection process as candidates for prosecutor positions using their bachelor's degree certificate in law from various study programs.

"Hence, related to the requirement to have at least a certificate of a bachelor's degree in law when joining the prosecutor's office, it no longer has logical and causal relations to say that the requirement causes constitutional losses to the Petitioners," Justice Arsul explained.

Meanwhile, the reason the Petitioners failed to qualify in the administrative process of civil servant selection in the Attorney General's Office is that they did not meet the study program qualification as required, which is fully the prerogative of the Attorney General's Office. The Attorney General's Office gets to decide on the qualifications and competence based on the needs of its organization. In this context, the constitutional losses, as the petitioners mentioned in the petition, were not convincing to be declared as specific and actual, or at least, potential, which, according to reasonable reasoning, would certainly occur. Hence, there are not enough causal relations between the losses being mentioned and the enactment of the law being tested.

Moreover, the institution that opens the selection could decide specifically the qualification of the study programs it needs. For example, it is possible that an institution may need a law graduate without the need to be specific about the study program, or it may also decide to specify the qualifications of a certain law graduate.

"Thus, according to the Court, the Petitioners do not have legal standing as the petitioners in the petition a quo," Justice Arsul said.

Also read :

[Failing Test to Become Prosecutors, Two Constitutional Law Graduates to Test Prosecutor's Law](#)

https://indonesia.kompas.com/read/2025/04/23/Petitioners_Review_No_Legal_Standing_Atorney_General_s_Office_Review_Inadmissible

2/3



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10225_4 HPM

NGKEMD-Petitioners Raising No Legal Standing, Attorney General's Office Review Institutional

Questioning Bachelor of Law Exclusivity in Prosecutor's Selection

The petitioners are two constitutional law graduates, Silvi Nudia Nazla and Mohammad Fajar Ismail. Silvia and Fajar are graduates of constitutional law from the Faculty of Syariah and Law of the Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. According to the Petitioners, the phrase "bachelor's of law" in the requirement to become a prosecutor in Article 9 paragraph (1) of Law No. 11 of 2021 had limited scope so it created injustice to graduates from similar programs study of law, such as Islamic Law, Constitutional Law, or Islamic Criminal Law.

"In the Advocate Law, to accommodate graduates of Syaria Faculty, the phrase no longer uses Bachelor of Law, but bachelor with an educational background of law so we can become advocates," legal counsel A. Fahrur Rozi stated during the Petition Revision Hearing on Thursday, March 6, 2025, at the Courtroom.

However, based on the Attorney General's Office Law, which states the phrase "bachelor's degree of law," the opportunity to become a prosecutor only opens for law graduates; meanwhile, it does not apply to Islamic law graduates. Fahrur stated that implementing the norms created exclusivity toward a specific educational qualification, disqualifying others.

The petitioners suffered from the exclusivity of the prosecutor's formation in the civil servant selection process as they were declared administratively unqualified because they did not meet the educational qualification required. The Attorney General's Office listed the requirements for the prosecutor position by only including and targeting two graduates of the bachelor's program, Law and Law Studies.

Meanwhile, Zulfikar Putra Utama, also a legal counsel, stated that China has progressive and inclusive regulations on the recruitment system, which enables various qualification paths to hold the position of prosecutor. Their system is not only limited to a bachelor of law but also provides opportunities for individuals with educational backgrounds outside of law to own a career as a prosecutor as long as they have the competence and understanding in the legal field.

In Spain, the prosecutor qualification has been determined using competence requirements that are substantive and comprehensive. The requirement explicitly emphasizes the importance of an in-depth understanding of legal system fundamental aspects. The competence includes understanding and interpreting the elements, structures, resources, and implementation of legal systems from various jurisdictions. It must also be supported by the ability to analyze the mechanism of legal dispute settlement, an individual's legal standing in an administrative context and its relations to the public institutions, and the capacity to implement legal resources priority criteria in determining existing norms, especially related to the constitutional principles and values. These requirements are implemented rigidly without limiting the educational background of prospective prosecutors.

In the petition, the Petitioners requested the Court to grant the petition in its entirety and declare the phrase "bachelor of law" in Article 9 paragraph (1) letter d of Law No. 11 of 2021 on Attorney General of the Republic of Indonesia contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have legally binding power as long as it is not interpreted as "bachelor of laws of another similar degree in the field of law."

Author: Mimi Kartika

Editor: Lulu Anjarsari P.

PR: Raisa Ayuditha M.

Translator: Rizky Kurnia Chaesario

Disclaimer: The original version of the news is in Indonesian. In case of any differences between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version will prevail.

© Friday, March 21, 2025 | 12:15 WIB

260

News

> Decision & Hearing

> Event

> Election

> International

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

C. Componential Analysis

This section presents the componential analysis of all 139 noun phrases extracted from the source and target texts. Each noun phrase is classified based on Widjono's (2005) structural typology, including Modificative (MOD), Coordinative (CRD), and Appositive (APP). The coding system (e.g., MOD-1, CRD-1, APP-1) indicates the type and order of appearance in the data. This sequential numbering facilitates accurate tracking, data referencing, and quantification of each noun phrase type across the analysis. Only noun phrases that appear in both the original and translated versions are deemed eligible as data for translation analysis. Omitted or untranslated noun phrases in the translated (English) version are excluded from analysis.

For each item, the applied translation technique is identified based on Molina and Albir's (2002) framework, selected through contextual analysis of the 83 full sentences. Due to space constraints in the table format, translation techniques are written directly as text rather than marked with visual indicators such as checkmarks. Accuracy is assessed using the scale proposed by Nababan et al. (2012), which includes three categories, including Accurate (2.51–3.00), Less Accurate (2.00–2.50), and Inaccurate (1.00–1.99). The accuracy score for each noun phrase is determined based on the mean score from three independent expert raters, who evaluated the translations in full contextual sentences.

Table of Componential Analysis

Code No.	Noun Phrases		Noun Phrase Types			Translation Techniques	Quality		
	IN Source Text	EN Target Text	MOD	CRD	APP		Accurate	Less Acc.	Inaccurate
MOD-1	Mahkamah Konstitusi (MK)	Constitutional Court	✓			Established Equivalence	✓		
MOD-2	Perkara Nomor 178/PUU-XXII/2024	Case No. 178/PUU-XXII/2024	✓			Established Equivalence	✓		
MOD-3	permohonan pengujian materi Pasal 9 ayat (1) huruf d	material judicial review petition of Article 9	✓			Calque	✓		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		paragraph (1) letter d							
MOD-4	Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021	Law No. 11 of 2021	✓				Established Equivalence	✓	
MOD-5	Kejaksaan Republik Indonesia	Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (Attorney General's Office Law)					Amplification		
MOD-6	para Pemohon	the Petitioners	✓				Established Equivalence	✓	
CRD-1	kedudukan hukum atau legal standing	legal standing		✓			Established Equivalent	✓	
MOD-7	anggapan kerugian hak konstitusional atas ketentuan yang diuji tersebut	the constitutional losses due to the enactment of the provisions being challenged	✓				Modulation	✓	
MOD-8	permohonan para Pemohon	the petitioners' petition	✓				Calque	✓	
APP-1	Ketua MK Suhartoyo	Chief Justice <u>Suharyoto</u>			✓		Established Equivalent		✓
APP-2	Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat.	the Plenary Courtroom.			✓		Reduction		✓
MOD-9	sidang pengucapan putusan	pronounced the decision	✓				Modulation		✓
MOD-10	pertimbangan hukum Mahkamah	legal considerations	✓				Reduction		✓
APP-3	Hakim Konstitusi Arsul Sani	Justice Arsul Sani			✓		Established Equivalence	✓	
MOD-11	para Pemohon	Petitioners	✓				Established Equivalence	✓	
MOD-12	pengujian undang-undang	judicial review	✓				Established Equivalence	✓	
MOD-13	lima syarat	five requirements	✓				Literal Translation	✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

MOD-14	hak konstitusional yang dirugikan	constitutional losses they suffer	✓			Modulation		✓	
MOD-15	Para pemohon	Petitioners	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-16	uraian adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional	their arguments on constitutional rights and authorities	✓			Modulation		✓	
MOD-17	anggapan kerugian hak konstitusional yang diderita atau dialami	the presumption of constitutional losses they suffer or experience	✓			Transposition		✓	
MOD-18	norma undang-undang yang diuji	norms being challenged	✓			Reduction		✓	
MOD-19	uraian berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional	arguments related to the perceived constitutional	✓			Modulation	✓		
MOD-20	para Pemohon	the Petitioners	✓			Established Equivalence	✓		
MOD-21	hubungan sebab akibat	causal relations	✓			Calque	✓		
MOD-22	norma Pasal 9 ayat (1) huruf d	norms in Article 9 paragraph (1) letter d	✓			Calque	✓		
MOD-23	UU 11/2021	Law No. 11 of 2021	✓			Establish Equivalent	✓		
MOD-24	para Pemohon	the Petitioners	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-25	kerugian hak konstitusional	their constitutional rights had been harmed	✓			Transposition	✓		
MOD-26	norma yang diajukan pengujian tersebut	the norms being tested	✓			Reduction	✓		
MOD-27	seorang jaksa	a prosecutor	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-28	ijazah paling rendah sarjana hukum	a minimum certificate of bachelor's degree	✓			Reduction			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

MOD-29	seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)	Civil Servant Candidates Selection	✓			Calque	✓		
MOD-30	Kejaksaan Agung	Attorney General's Office	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-31	para Pemohon	the Petitioners	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-32	kedudukan hukum	legal standing	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-33	isu konstitusional berijazah paling rendah sarjana hukum	the constitutionality issue of the educational requirement	✓			Generalization		✓	
MOD-34	seleksi CASN pada Kejaksaan Agung in casu sebagai calon Jaksa	the selection process as candidates for prosecutor positions	✓			Reduction		✓	
MOD-35	para Pemohon	the Petitioners	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-36	sarjana hukum	bachelor's degree certificate in law	✓			Calque	✓		
MOD-37	segala jenis program studinya	various study programs	✓			Reduction		✓	
MOD-38	persyaratan berijazah paling rendah sarjana hukum	the requirement to have at least a certificate of a bachelor's degree in law	✓			Transposition	✓		
CRD-2	keterkaitan logis dan causal verband	logical and causal relations		✓		Calque	✓		
MOD-39	ketentuan tersebut	the requirement	✓			Reduction		✓	
MOD-40	kerugian hak konstitusional	constitutional losses	✓			Reduction		✓	
MOD-41	para Pemohon	the Petitioners	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-42	ihwal tidak lolosnya para Pemohon	the reason the Petitioners	✓			Calque	✓		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		failed to qualify							
MOD-43	tahap seleksi administrasi CASN Kejaksaan Agung	the administrative process of civil servant selection in the Attorney General's Office	✓				Calque	✓	
MOD-44	kualifikasi program studi yang dipersyaratkan	the study program qualification as required	✓				Calque	✓	
MOD-45	kewenangan Kejaksaan Agung	the prerogative of the Attorney General's Office	✓				Established Equivalent	✓	
CRD-3	kualifikasi dan kompetensi terkait kebutuhan CASN pada organisasinya	the qualifications and competence based on the needs of its organization		✓			Reduction		✓
MOD-46	kerugian yang diuraikan pada permohonan	the constitutional losses, as the petitioners mentioned in the petition	✓				Amplification	✓	
MOD-47	penalaran yang wajar	reasonable reasoning	✓				Calque	✓	
MOD-48	hubungan sebab akibat	causal relations	✓				Calque	✓	
MOD-49	kerugian dimaksud	the losses being mentioned	✓				Calque	✓	
MOD-50	berlakunya undang-undang yang diuji	the enactment of the law being tested	✓				Calque	✓	
MOD-51	instansi yang membutuhkan CASN	the institution that opens the selection	✓				Modulation		✓
MOD-52	kualifikasi program studi	the qualification of the study programs	✓				Calque	✓	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

MOD-53	suatu instansi	an institution	✓			Literal Translation	✓		
MOD-54	sarjana hukum	a law graduate	✓			Calque	✓		
MOD-55	program studi	study program	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-56	sarjana hukum dengan spesifikasi atau kualifikasi tertentu	to specify the qualifications of a certain law graduate	✓			Transposition	✓		
MOD-57	para Pemohon	the Petitioners	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-58	kedudukan hukum	legal standing	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-59	permohonan a quo	the petition a quo	✓			Borrowing	✓		
MOD-60	para Pemohon perkara ini	The petitioners	✓			Reduction		✓	
MOD-61	dua sarjana hukum program studi (prodi) hukum tata negara	two constitutional law graduates	✓			Generalization		✓	
CRD-4	Silvi Nudia Nazla dan Mohammad Fajar Ismail	Silvia and Fajar		✓		Reduction			✓
MOD-62	para Pemohon	the Petitioners	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-63	frasa 'sarjana hukum'	the phrase "bachelor's of law"	✓			Calque		✓	
MOD-64	ketentuan persyaratan	the requirement	✓			Generalization	✓		
MOD-65	seorang jaksa	a prosecutor	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-66	Pasal 9 ayat (1) huruf d	Article 9 paragraph (1)	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-67	UU 11/2021	Law No. 11 of 2021	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-68	cakupan yang terbatas	limited scope	✓			Calque	✓		
MOD-69	ketidakadilan bagi lulusan program studi yang serumpun	injustice to graduates from similar programs study of law	✓			Literal Translation		✓	
CRD-5	Hukum Islam, Hukum Tata Negara, atau Hukum	Islamic Law, Constitutional Law, or Islamic							

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Pidana Islam.	Criminal Law.							
MOD-70	UU Kejaksaan	the Attorney General's Office Law	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-71	frasa 'sarjana hukum'	the phrase "bachelor's degree of law,"	✓			Calque			✓
MOD-72	kesempatan untuk menjadi seorang jaksa	the opportunity to become a prosecutor	✓			Literal Translation	✓		
MOD-73	sarjana hukum	law graduates	✓			Establish Equivalent	✓		
MOD-74	sarjana hukum bidang Islam	Islamic law graduates	✓			Calque	✓		
MOD-75	pemberlakuan norma frasa 'sarjana hukum' tersebut	implementing the norms	✓			Reduction		✓	
MOD-76	suatu kualifikasi pengetahuan yang sejatinya sama	a specific educational qualification	✓			Reduction		✓	
MOD-77	Undang-Undang Advokat	Advocate Law	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-78	lulusan Fakultas Syariah	graduates of Syaria Faculty	✓			Calque	✓		
MOD-79	sarjana hukum	Bachelor of Law	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-80	sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum	bachelor with an educational background of law	✓			Calque	✓		
MOD-81	sidang perbaikan permohonan	Petition Revision Hearing	✓			Established Equivalent	✓		
APP-4	kuasa hukum Para Pemohon A. Fahrur Rozi	legal counsel A. Fahrur Rozi			✓	Reduction		✓	
APP-5	Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.	the Courtroom.			✓	Reduction		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

MOD-82	Mekanisme rekrutmen aparatur sipil negara (ASN)	the civil servant selection process	✓			Generalization		✓	
MOD-83	formasi jaksa	the prosecutor's formation	✓			Calque		✓	
MOD-84	para Pemohon	The petitioners	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-85	syarat administratif	administratively	✓			Transposition		✓	
MOD-86	kualifikasi pendidikan dengan program studi yang disyaratkan.	the educational qualification required.	✓			Reduction		✓	
MOD-87	Kejaksaan Republik Indonesia	Attorney General's Office	✓			Reduction		✓	
MOD-88	syarat kelulusan	the requirements	✓			Reduction		✓	
MOD-89	formasi jaksa	prosecutor position	✓			Calque		✓	
MOD-90	dua nomenklatur lulusan program studi	two graduates of the bachelor's program	✓			Reduction		✓	
CRD-6	S-1 Program Studi Hukum atau S-1 Program Studi Ilmu Hukum	Law and Law Studies		✓		Generalization			✓
APP-6	kuasa hukum para Pemohon lainnya Zulfikar Putra Utama	Zulfikar Putra Utama, also a legal counsel			✓	Transposition	✓		
MOD-91	Republik Rakyat China	China	✓			Generalization		✓	
MOD-92	ketentuan yang progresif dan inklusif	progressive and inclusive regulations	✓			Calque	✓		
MOD-93	sistem rekrutmen kerja	the recruitment system	✓			Generalization	✓		
MOD-94	kebijakan yang memungkinkan	which enables various	✓			Transposition		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	berbagai jalur kualifikasi	qualification paths							
MOD-95	posisi jaksa	the position of prosecutor	✓			Calque	✓		
MOD-96	Sistem mereka	Their system	✓			Calque	✓		
MOD-97	lulusan sarjana hukum	a bachelor of law	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-98	individu dengan latar belakang pendidikan non-hukum	individuals with educational backgrounds outside of law	✓			Calque	✓		
CRD-7	kompetensi dan pemahaman	competence and understanding		✓		Literal Translation	✓		
MOD-99	bidang hukum	legal field	✓			Established Equivalent	✓		
MOD-100	ketentuan di Spanyol tentang kualifikasi jaksa	In Spain, the prosecutor qualification	✓			Transposition		✓	
MOD-101	serangkaian persyaratan kompetensi	competence requirements	✓			Reduction	✓		
CRD-8	substansif dan komprehensif	substantive and comprehensive		✓		Literal Translation	✓		
MOD-102	Ketentuan dimaksud	The requirement	✓			Reduction		✓	
MOD-103	pentingnya pemahaman mendalam	the importance of an in-depth understanding	✓			Calque	✓		
MOD-104	aspek-aspek fundamental sistem hukum	legal system fundamental aspects	✓			Calque	✓		
MOD-105	kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan	understanding and interpreting	✓			Reduction		✓	
CRD-9	unsur-unsur, struktur, sumber daya, serta penerapan sistem hukum	elements, structures, resources, and implementation of legal systems		✓		Calque	✓		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

MOD-106	berbagai yurisdiksi	various jurisdictions	✓			Literal Translation	✓		
MOD-107	kemampuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hukum	the ability to analyze the mechanism of legal dispute settlement	✓			Calque	✓		
MOD-108	kedudukan hukum individu	an individual's legal standing	✓			Calque	✓		
MOD-109	konteks administratif	administrative context				Calque	✓		
MOD-110	hubungannya dengan badan-badan publik	its relations to the public institutions				Calque		✓	
MOD-111	kemampuan untuk menerapkan kriteria prioritas sumber hukum	the capacity to implement legal resources priority criteria				Calque		✓	
MOD-112	norma yang berlaku	existing norms		✓		Generalization	✓		
CRD-10	prinsip-prinsip dan nilai-nilai konstitusional	constitutional principles and values							
MOD-113	seluruh persyaratan kompetensi	These requirements				Generalization		✓	
MOD-114	latar belakang program studi calon jaksa	the educational background of prospective prosecutors				Calque	✓		
MOD-115	para Pemohon	the Petitioners				Established Equivalent	✓		
MOD-116	permohonan untuk seluruhnya	the petition in its entirety				Calque	✓		
MOD-117	frasa 'sarjana hukum'	the phrase "bachelor of law"				Calque		✓	
MOD-118	Pasal 9 ayat (1) huruf d	Article 9 paragraph (1) letter d				Establish Equivalent	✓		
MOD-119	UU 11 Tahun 2021	Law No. 11 of 2021				Establish Equivalent	✓		

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

MOD-120	Kejaksaan Republik Indonesia	Attorney General of the Republic of Indonesia				Calque		✓	
MOD-121	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945	the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia				Established Equivalent	✓		
MOD-122	kekuatan hukum mengikat	legally binding power				Calque	✓		
CRD-11	“berijazah paling rendah sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum pada saat masuk Kejaksaan.”	“bachelor of laws of another similar degree in the field of law.”	✓			Reduction		✓	

The table consolidates noun phrase classification, applied technique, and accuracy score into a single table, enabling cross-analysis across all 139 data points. This structure allows observation of how translation techniques interact with noun phrase types and how both affect translation quality. This componential analysis provides the basis for deeper interpretation in the sub-chapter **4.2 Discussion**, revealing the current translation practices behavior in the Constitutional Court’s institutional context.